

TERM OF REFERENCE
SEMINAR NASIONAL
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

SINERGI PENEGAKAN ETIKA KELEMBAGAAN
“Penguatan Kualitas Perilaku Etis
dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik
Melalui Peran Partai Politik”

A. LATAR BELAKANG

Kualitas penegakan etika di ranah publik tidak usai menjadi perhatian seiring dengan berbagai kasus yang melibatkan para pemangku jabatan. Selain yang bersumber dari pilihan rakyat, jabatan publik yang diterima melalui jenjang karir maupun penunjukkan langsung kekuasaan, pada gilirannya tidak menafikan adanya keharusan tanggung jawab dengan serangkaian fasilitas dan amanah publik yang diperoleh.

Secara khusus, jabatan Anggota DPR tidak hanya menegaskan bahwa mereka yang mendudukinya adalah wakil rakyat. Tapi juga menyisakan amanah dan kepercayaan rakyat untuk semata-mata menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya demi kepentingan rakyat. Selebihnya, maka ditengarai kepentingan-kepentingan lain yang sekaligus berkonflik dengan kepentingan rakyat tidak bisa terelakkan.

Meski demikian, idealisme tipologi peran pejabat publik tersebut tidak bisa dipandang sederhana sebagai semata sebuah kewajiban. Paradigma berpikir tentang kesejatian jabatan publik (wakil rakyat) perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh *stakeholder* yang mengitarinya. Salah satunya adalah peran Partai Politik sebagai sumber rekrutmen figur sekaligus wadah kaderisasi.

Sebagai hulu dari kemunculan para calon Pemangku Jabatan Wakil Rakyat, maupun sebagai dari Jabatan Pemerintahan (eksekutif), kualitas dan kapasitas penegakan etika di lembaga Partai Politik menjadi sebuah keniscayaan. Menafikan fungsi dan peran Partai Politik seperti halnya melepas rentang kendali laboratorium kepemimpinan dan membiarkan jatuh dalam kubangan tanpa kepastian arah dan tujuan.

Kenyataan itulah yang seringkali mengemuka dalam persoalan-persolan etika yang menghampiri kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ihwal figur Anggota DPR yang diduga maupun terbukti melakukan pelanggaran kode etik acapkali memiliki irisan kuat dengan peran dan *positioning* dalam partai politik. Tidak jarang bahkan melibatkan figur-figur penting ataupun desakan kepentingan partai politik.

Instrumen kepartaian memiliki peran dan kewenangan langsung yang tidak sekedar melakukan kinerja penindakan (eksekutorial) terkait berbagai perselisihan dalam ranah internal kepartaian, tapi juga

memiliki strategi pengawasan dan pembinaan penegakan etika secara umum, agar perilaku internal kepartaian tidak berada dalam ruang yang berpotensi menyisakan perselisihan dari waktu ke waktu.

Manajemen kepartaian diyakini mampu memberi dukungan signifikan pada pembentukan paradigma etis bagi pejabat publik, khususnya jabatan Wakil Rakyat. *Habitus* kepartaian mampu memanfaatkan modal-modal simbolik yang pada gilirannya akan mengarahkan ada suasana ketaatan dan ketundukan sekaligus pemahaman yang utuh tentang bagaimana menjalani hari demi hari dengan jabatan keanggotaan DPR yang disandang.

Atas dasar itu, sinergi peran kelembagaan etika, maupun kewenangan penindakan yang dilakukan oleh Partai Politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI diharapkan mampu melahirkan solusi komprehensif dalam rangka mengelola etika kelembagaan di masa yang akan datang sebagai perwujudan tanggung jawab atas jabatan publik.

B. DESAIN KEGIATAN

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk SEMINAR NASIONAL yang menghadirkan Peserta yang representatif dan Narasumber yang berkompeten dalam Bidang Penegakan Etika Jabatan Publik. SEMINAR NASIONAL dibagi dalam 3 (tiga) Sub Tema dengan 3 (tiga) Sesi Pertemuan. Ketiga Sub Tema tersebut adalah:

1. Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan DPR RI dengan Partai Politik

Pembicara :

- **Dr. Abdul Choir Ramadhan, S.H, M.H,**
- **H.Fahri Hamzah, S.E.**
- **Andi Mattalatta, S.H, M.H**
- **Komarudin Watubun S.H., M.H. (Mahkamah Partai/Ka.bidang Kehormatan PDIP)**
- **Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Perwakilan Mahkamah Partai PAN)**

2. Penguatan Kualitas Perilaku Etika Kelembagaan Wakil Rakyat dan Partai Politik

Pembicara :

- **Dr. Johannes Haryatmoko**
- **Albertina Ho, S.H, M.H**
- **H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa S.IP., MH**
- **Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Mahkamah Partai Golkar)**
- **Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A (Mahkamah Partai PKS)**

- **M. Maulana Bungaran, SH, MH (Mahkamah Partai Gerindra/
Sekretaris Majelis Kehormatan Gerindra)**

3. Kapasitas Pengelolaan Etika Kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan Partai Politik

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Partai dan Pimpinan MKD

C. PENYELENGGARA KEGIATAN

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

D. TUJUAN KEGIATAN

Adapun beberapa tujuan yang hendak dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Melakukan diseminasi gagasan Arah Baru Kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ke berbagai institusi politik kepartaian.
2. Melahirkan format kerjasama efektif dan efisien terkait penegakan etika kelembagaan antara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dengan Partai Politik.
3. Merumuskan visi dan misi bersama dalam penegakan etika kelembagaan antara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dengan institusi partai politik sebagai kawah candradimuka kelahiran figur ideal pejabat publik.

E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal **22 Maret 2021**, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta.

F. PESERTA KEGIATAN

1. 25% dari Kapasitas Ruangan.
2. Pengurus Partai Politik (2 orang perwakilan dari Mahkamah Partai)
3. Badan Kehormatan DPRD Provinsi (2 orang perwakilan dari seluruh Badan Kehormatan DPRD Provinsi)
4. Akademisi/Mahasiswa